

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *e-government* dalam mempengaruhi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia, mengevaluasi pengelolaan PNBP, dan menilai peningkatannya. Fokusnya adalah pada penerapan *e-government* di Kementerian Keuangan, khususnya dampaknya terhadap percepatan pengambilan keputusan dan peningkatan PNBP. Penelitian dibatasi pada penggunaan *e-government* dalam pengelolaan PNBP, menggunakan data primer dan sekunder dari pengelola PNBP melalui analisis tematik. Hasil menunjukkan bahwa *e-government* meningkatkan efisiensi administrasi dengan mengotomatisasi proses manual, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pemantauan real-time, serta mengurangi penghindaran dan kecurangan PNBP melalui integrasi data antar lembaga. *E-government* juga memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik antar kementerian dan lembaga, serta mendorong transformasi digital dan modernisasi sistem pemerintahan. Penelitian ini menekankan pentingnya *e-government* dalam meningkatkan pengelolaan PNBP melalui efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih baik, didukung oleh regulasi yang kuat dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan seperti ketergantungan pada data kualitatif dan ketiadaan analisis kuantitatif mendalam. Penelitian lanjutan sebaiknya mencakup metode kuantitatif dan teknik pengumpulan data yang lebih beragam untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: *e-government, PNBP, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, transformasi digital.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of e-government in influencing Non-Tax State Revenue (PNBP) in Indonesia, evaluate the management of PNBP, and assess its improvement. The focus is on the application of e-government in the Ministry of Finance, particularly its impact on accelerating decision-making and increasing PNBP. The study was limited to the use of e-government in PNBP management by utilizing primary and secondary data from PNBP managers through thematic analysis. The results showed that e-government enhanced administrative efficiency by automating manual processes, improved transparency and accountability through real-time monitoring, and reduced PNBP evasion and fraud through data integration across agencies. E-government also facilitated better collaboration between ministries and agencies and promoted digital transformation and modernization of government systems. This research emphasized the importance of e-government in improving PNBP management through better efficiency, transparency, and accountability, supported by strong regulations and active participation from various parties. However, this study has limitations such as reliance on qualitative data and the absence of in-depth quantitative analysis. Future research should include quantitative methods and more diverse data collection techniques to provide a more comprehensive overview.

Keywords: *e-government, PNBP, efficiency, transparency, accountability, digital transformation.*